Isu-isu demokratisasi pada surat kabar Indonesia era orde baru dan orde reformasi

Riswandi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96905&lokasi=lokal>

Abstrak

Sejak Soeharto "tengser" pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh BJ. Habibie sebagai Presiden RI Ketiga, surat kabar Indonesia tampak lebih sering dan berani menampilkan isu-isu demokratisasi seperti terlihat dari judul-judul berita surat kabar Kompas, Merdeka, dan Republika, dan surat kabar lainnya. Berdasarkan kritik tolak dari pengamatan inilah peneliti ingin mengetahui jawaban permasalahan "apakah terdapat kecenderungan perbedaan di antara media cetak di Jakarta, khususnya harian Kompas, Merdeka, dan Republika dalam memuat isu-isu demokratisasi pada era Orde Baru dan Orde Reformasi" dan "apakah terdapat pula kecenderungan perbedaan di antara Kompas, Merdeka, dan Republika dalam menampilkan apa yang discbul dengan politisi, profesional, dan aktivis pada era Orde Baru dan Orde Reformasi".

Pisau analisis (tools of analysis) yang dipakai adalah teori Dan Nimmo sebagaimana dikemukakannya dalam bukunya Komunikasi Politik : Komunikasi, Media, yang mengatakan bahwa komunikasi politik mencakup politisi profesional, dan aktivis.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode analisis isi (Content Analysis).

Setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terdapat perbedaan yang tajam di antara surat kabar Indonesia, khususnya harian Kompas, Merdeka, dan Republika dalam memuat isu-isu demokratisasi pada era Orde Baru dan era Orde Reformasi. Di samping tidak terdapat pula perbedaan antara isu-isu demokratisasi yang dimuat harian Kompas, Merdeka, dan Republika pada era Orde Baru dan Orde Reformasi. Temuan lain adalah bahwa tidak terdapat perbedaan yang tajam di antara surat kabar Kompas, Merdeka, dan Republika dalam menampilkan komunikator politik yang mencakup politisi, profesional, dan aktivis pada era Orde Baru dan Orde Reformasi.

Dengan demikian perubahan Sistem Politik Indonesia yang ditandai oleh pergantian rejim dari rejim Soeharto yang otoriter kepada rejim Habibie yang lebih demokratis tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pola pemberitaan media cetak nasional, khususnya harian Kompas, Merdeka, dan Republika. Hal ini disebabkan karena ide-ide demokratisasi yang berkembang di dalam masyarakat belum terdistribusi secara merata pada media cetak nasional, khususnya harian Kompas, Merdeka, dan Republika.

Beranjak dari temuan ini, maka pimpinan harian Kompas, Merdeka, dan

Republika harus menetapkan suatu kebijakan yang mampu mengakomodasikan